

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
4071/KOM-D/SD-S1/2020

**PELAKSANAAN *MEDIA RELATIONS* HUMAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh :

NURLISA ALFIUNITA

NIM. 11443204646

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FAKULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box 1004 Telp. 0761-7046522
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, Email: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan *Media Relations* Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau" yang ditulis oleh :

Nama : Nurlisa Alfunita
NIM : 11443204646
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Telah di munaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Agustus 2019

Dan disetujui sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Februari 2020

Dekan

Dr. Nurdin, MA

NIP. 19660620 200604 1 015

Tim Penguji

Ketua Sidang/Penguji I

Musfaldy, S.Sos., M.Si

NIP. 19721201 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Usman M. Ikom

NIK. 1130417119

Penguji III

Intan Kemala, S.Sos., M.Si

NIP. 19810612 200801 2 017

Penguji IV

Dr. Elfiandri, S.Ag., M.Si

NIP. 19700312 199703 1 006

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman Persetujuan Pembimbing

PELAKSANAAN MEDIA RELATIONS

HUMAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI RIAU

Disusun Oleh:

Nama : Nurlisa Alfunita


NIM : 11443204646

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal: 18 Januari 2018

Pembimbing I



Intan Kemala, S.Sos., M.Si
 NIP. 19810612 200801 2 017

Pembimbing II


Perdamaian, Hsb, M.Ag
 NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Komunikasi


Rafdeadi, S.Sos.I, MA
 NIP. 19821225 201101 1 001

UIN SUSKA RIAU

Scanned with CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Proposal dengan judul **“Pelaksanaan Media Relations Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau”** yang diajukan oleh :

Nama : Nurlisa Alfunita
 NIM : 11443204646
 Jurusan : Ilmu Komunikasi

Telah diseminarkan pada:
 Hari / Tanggal : Selasa, 06 Maret 2018
 Pukul : 14.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Dengan ini diterima untuk penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Maret 2018
 Penguji,

Rafdeadi, S.Sos.L, MA
 NIP. 19821225 201101 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURLISA ALFIUNITA

NIM : 11443204646

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Media Relations* Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau” adalah karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 31 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Nurlisa Alfiunita
11443204646

UIN SUSKA RIAU

Scanned with CamScanner



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 31 Agustus 2018

Dosen Pembimbing Skripsi
No. : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya, guna kesempurnaan skripsi ini, maka atas nama **NURLISA ALFIUNITA, NIM: 11443204646** dapat diajukan untuk menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi dengan judul skripsi "PELAKSANAAN *MEDIA RELATIONS* HUMAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI RIAU".

Harapan kami agar dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,

Pembimbing I

Intan Kemala, S.Sos., M.Si
NIP. 19810612 200801 2 017

Pembimbing II

Perdamaian, Hsb, M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Nurlisa Alfiunita
NIM : 11443204646
Judul : Pelaksanaan Media Relations Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban baik secara institusional maupun individual. Humas menjadi jendela DPRD Provinsi Riau bagi masyarakat luas sebagai bagian dari upaya pelaksanaan pembangunan yang akuntabel, kompetitif, terbuka dan transparan. Dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas, dalam menjalankan tugasnya, humas banyak bekerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik dan juga online. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa pelaksanaan *media relations* Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program dan kebijakan instansi, serta mengetahui peran Humas di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan/literatur. Informan dalam penelitian ini adalah Kabag Umum DPRD Prov. Riau, Kasubbag Humas dan Perpustakaan dan Ketua Wartawan Parlemen Riau (WPR) DPRD Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas telah dapat melaksanakan berbagai kegiatan *media relations* dengan baik dengan berbagai kategori pelaksanaan *media relations* yaitu Kegiatan *media relations* dalam bentuk acara-acara *media relations* (*event*) dan Kegiatan *media relations* dalam bentuk tulisan, dalam hal ini Humas telah menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator komunikasi. Namun, pelaksanaan *media relations* itu sendiri belum dinilai maksimal sebab Humas belum dapat menjalankan perannya sebagai sumber informasi dengan baik.

Kata kunci : Media Relations, DPRD Prov. Riau, Peran Humas, Wartawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Nurlisa Alfiunita
Student Reg. No: 11443204646
Title : The Media Relations Implementation of Riau Local Representatives' (DPRD) Public Relations

Local Representatives was an institution in a region which became an element of local government. It has legislative, budgeting and supervising functions. It has tasks and authorities as well as rights and obligations individually and institutionally. Its public relations can be a window for accountable, competitive, and transparent institution. Its main task is to disseminate information. It can corporate with mass media such as print, electronic and online media. The objective of this research was to analyze the media relations implementation of Riau local representatives' public relations in socializing the institution program and policy. It also aimed to know the role of public relations in this institution. This research used qualitative – descriptive approach. Data were collected from in-depth interview and library research. Informants were the head of general section, the head of public relations and library sub-section, and the head of Riau Parliamentary Journalists. This thesis found that the public relations implemented some media relations activities. These included event and writing activities. The public relations run its role as a communication technician and communication facilitator. However, its media relations implementation was not maximal because it could not implement its role as a good information source yet.

Keywords: Media Relations, Riau Local Representatives, Role, Public Relations, Journalists.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Media Relations Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau**” ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua penulis, yaitu Ayah Samsuni dan Ibunda Rosmawaty dan seluruh keluarga besar penulis yang mempunyai pengaruh besar atas segala pencapaian saat ini, dan tak lupa penulis menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

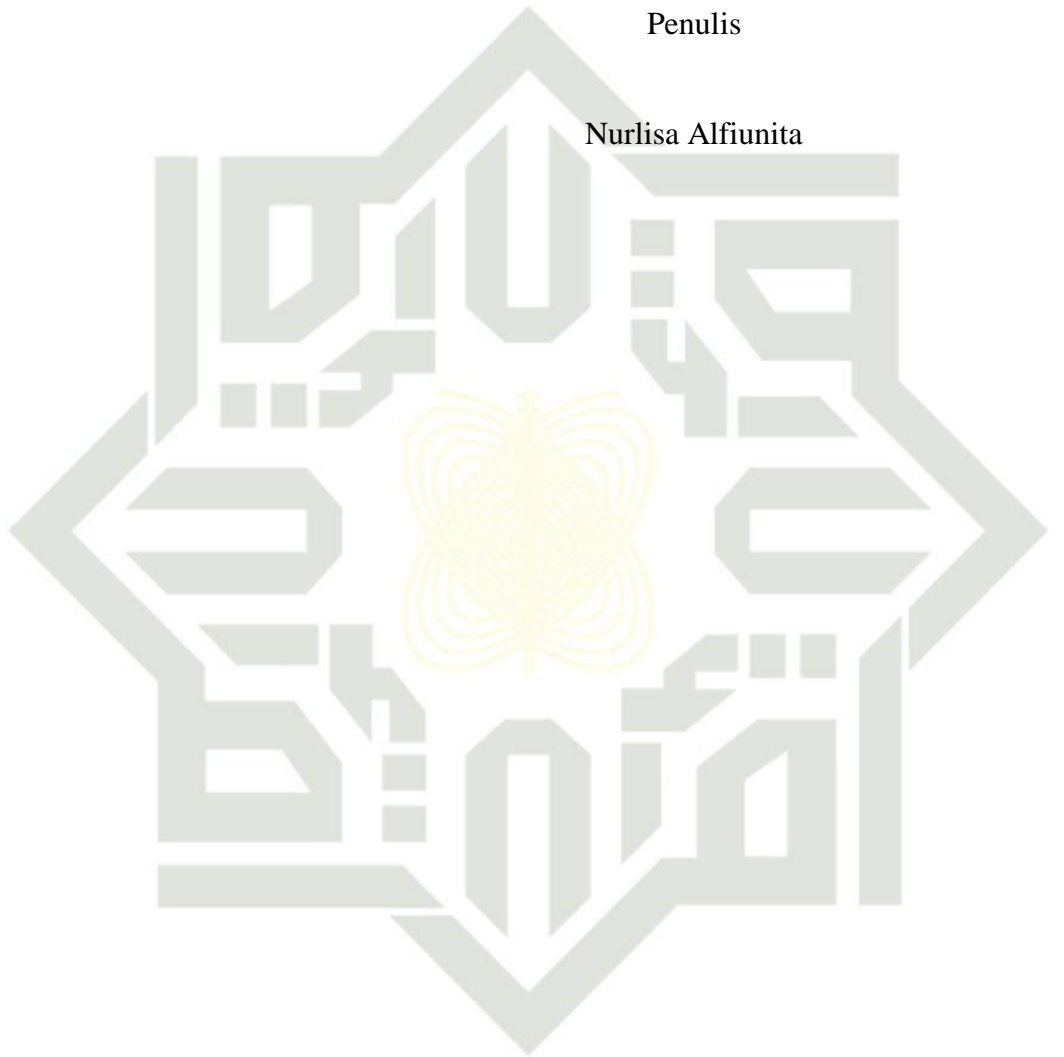
5. Bapak Dr. Nurdin, MA., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Bapak Dr. Azni, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
10. Ibu Intan Kemala, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak Perdanaian, Hsb, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
12. Kakak H.M. Azaly Djohan, SH selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau yang senantiasa memberikan suport kepada penulis;
13. Kakak Drs. OK Nizami Jamil selaku Ketua Harian Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Riau yang tak henti memberikan motivasi kepada penulis;
14. Bapak H. Agung Nugroho, SE dan Ibu Hj. Sulastri. A, S.Sos., MH yang senantiasa memberikan dorongan baik secara moral serta moril selama penulis menjalani masa perkuliahan;
15. Rekan-rekan Dewan Kerja Daerah Riau yang tak henti mengingatkan dan memberi semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
16. Teman-teman Kelas Public Relations A yang selalu menyemangati dan membantu peneliti dalam penyusunan sampai presentasi sidang skripsi ini;
17. Sahabat-sahabat Komunikasi angkatan 2014, Rini Nurkhalida, Adelilla, Linda

Novi Susanti (We Are One. Go, Fight, Win!). Saya akan selalu merindukan kenangan-kenangan kita bersama.

Pekanbaru, 1 Agustus 2020

Penulis

Nurlisa Alfiunita



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Kajian Teori	10
B. Kajian Terdahulu	34
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C.	Subjek Penelitian.....	40
D.	Sumber Data	41
E.	Teknik Pengumpulan Data	41
F.	Validitas Data	43
G.	Teknik Analisis Data	43
BAB IV	GAMBARAN UMUM.....	45
BAB V	LAPORAN PENELITIAN.....	54
A.	Hasil Penelitian.....	54
B.	Pembahasan	63
BAB VI	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.E.1	49
Tabel 4.E.2	50



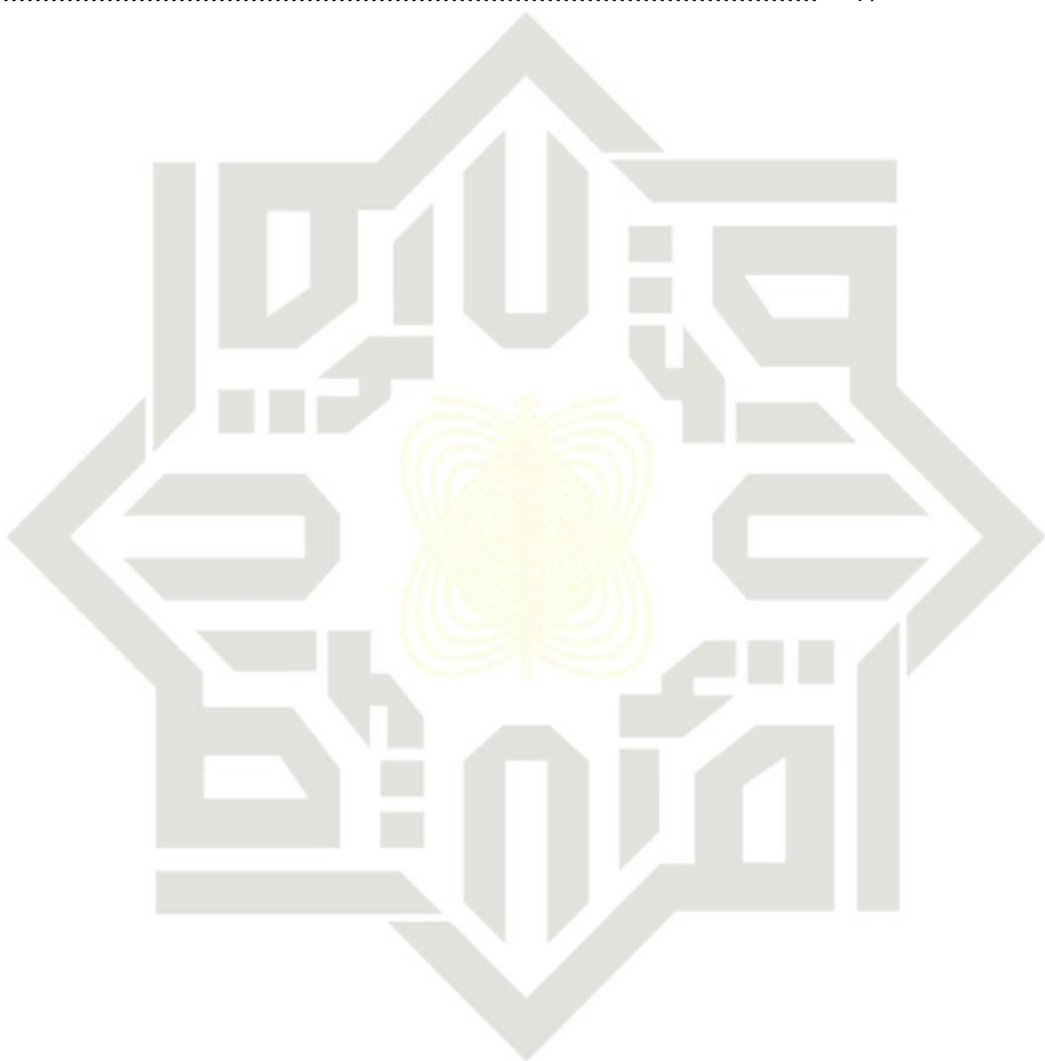
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.a	15
Gambar 4.1	47



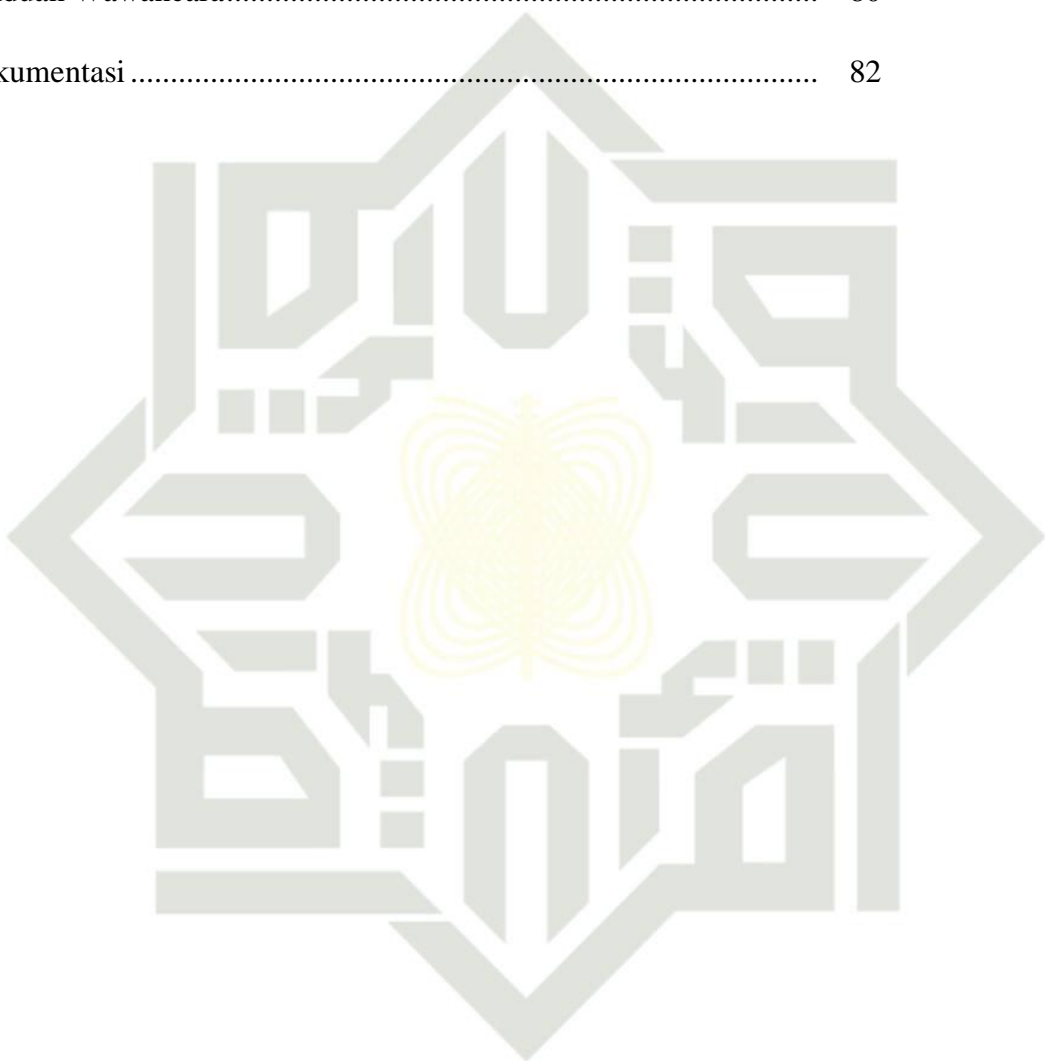
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Panduan Wawancara.....	79
Lampiran 2	Panduan Wawancara.....	80
Lampiran 3	Dokumentasi	82



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini peran media massa sebagai media informasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari sifatnya media massa informasi akan cepat tersiar dan dapat menjangkau lapisan masyarakat luas secara serentak.

Aktifitas komunikasi humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian, serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance. Perkembangan media sangat mempengaruhi *media relations* yang dijalankan oleh pemerintah. Pertumbuhan media massa yang pesat memudahkan aktifitas media.¹

Frank Jefkins menjelaskan bahwa *media relations* adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atau suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.²

Sementara itu Sam Black dan Melvin L. Sharpe menjelaskan *media relations* lebih kepada hubungan antara organisasi dengan media. Defenisinya adalah hubungan antara suatu organisasi dengan pers, radio dan televisi secara dua arah atau dua pihak.

Media relations tidak hanya terkait dengan kepentingan sepihak, organisasi saja atau media saja, melainkan kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama. Dengan demikian, akan membuat hubungan kerjasama menjadi *win-win solutions*. Dalam hal ini, perusahaan atau praktisi humas harus benar-benar memahami kepentingan-kepentingan perusahaan media, wartawan serta insan-insan media lain yang terlibat didalam aktifitas industri media itu sendiri.

Sebagai seorang praktisi kehumasan yang sebagian besar kegiatannya adalah melakukan aktifitas yang berhubungan dengan masyarakat, tentunya diharuskan

¹ Diah Wardani, *Media relations Sarana Membangun Reputasi Organisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, Cetakan Pertama), hal 7.

² Jefkins. *Media Relations*, (Jakarta: PT. Gelors Aksara Pertama Erlangga, 2000), hal. 98.

memiliki kepandaian dalam berkomunikasi. Seorang praktisi humas tidaklah mungkin menjangkau masyarakat dengan hanya mengandalkan bertatap muka langsung dengan masyarakat, karena dibutuhkan tenaga dan biaya yang lebih besar pula. Selain keterampilan berkomunikasi yang harus dimiliki, seorang praktisi humas juga harus menjalin hubungan baik dengan media masa. Hal ini dikarenakan media masa melalui berbagai pemberitaannya mampu menjangkau masyarakat secara luas dengan waktu yang relatif singkat pula.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban baik secara institusional maupun individual.

Tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPR Daerah Kabupaten/Kota, memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membentuk Panitia Pengawas Pemilihan kepala daerah, melakukan pengawasan dan meminta laporan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Anggota DPR Daerah mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administratif.³

Dilihat dari bidang yang ditanganinya, baik berupa pembangunan fisik maupun penerbitan peraturan perundangan yang mendukung. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan perkembangan kesadaran masyarakat akan progress nyata pembangunan nasional, tuntutan akan adanya transparansi pada setiap proses penyelenggaraan pembangunan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Kebutuhan akan informasi yang akurat menjadikan proses komunikasi dan publikasi sebagai sebuah mekanisme penyebarluasan informasi yang harus dilakukan oleh Humas DPRD Provinsi Riau untuk menjelaskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan.

Dengan adanya perkembangan yang begitu kompleks di tanah air, DPRD Provinsi Riau sebagai institusi (pemerintah) harus mengikuti perkembangan yang ada. Dalam hal ini DPRD Provinsi Riau harus dapat melakukan reformasi melalui debirokratisasi, transparansi dan akuntabilitas kepada Publik untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas seberapa jauh anggaran yang telah diberikan kepada pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.

Rentannya berbagai tanggapan masyarakat secara awam menilai kinerja buruk DPRD Provinsi Riau berdasarkan pada penilaian rancangan peraturan daerah yang sampai saat ini kurang maksimal mulai dari pelaksanaan tugas pansus hingga pengesahan yang nantinya akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Evaluasi terus dilakukan terkait dengan kepentingan untuk mempersiapkan pelaksanaan program yang lebih matang guna meningkatkan kepercayaan Publik melalui informasi yang lebih positif. Informasi-informasi yang menunjukkan penilaian

³ Prof. Dr. C. S. T. Kansil, S. H., Christine S. T Kansil, S. H., M. H., Sistem Pemerintahan Indonesia.

terhadap DPRD Provinsi Riau tersebut memiliki nilai berita tinggi, sehingga pihak media merasa perlu untuk mempublikasikan sebagai bagian dari kepentingan Publik.

DPRD Provinsi Riau dituntut dapat menyediakan informasi tandingan yang lebih positif dalam menghadang berbagai informasi negatif yang ada. Berbagai bentuk informasi mengenai kinerja DPRD dan pencapaiannya dapat menjadi salah satu cara dalam memberikan gambaran dari adanya perbaikan kinerja yang telah dilakukan DPRD disamping terus melakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang didukung dengan pemberian informasi yang faktual. Upaya informatif tersebut perlu didukung melalui kegiatan *media relations* yang baik melalui penyelenggaraan hubungan baik dengan pihak pers dan pelaku media lainnya. DPRD Provinsi Riau tentunya dapat memanfaatkan fungsi humas sebagai pelaksana dari berbagai kegiatan *media relations*.

Humas menjadi jendela DPRD Provinsi Riau bagi masyarakat luas sebagai bagian dari upaya pelaksanaan pembangunan yang akuntabel, kompetitif, terbuka dan transparan. Dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas, dalam menjalankan tugasnya, humas banyak bekerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik dan juga online. Penyebarluasan informasi kepada publik harus bisa dipertanggungjawabkan oleh DPRD Provinsi Riau kepada masyarakat umum. Oleh karena itu peranan media sebagai sarana penyebarluasan informasi sangat dibutuhkan oleh DPRD Provinsi Riau.

Bidang Humas DPRD Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan pimpinan DPRD Provinsi Riau melalui hubungan media (cetak maupun elektronik), pelayanan masyarakat dalam berbagai bentuk penyajian dan hubungan informasi antar lembaga. Informasi yang disediakan Humas DPRD Provinsi Riau dapat mencakup berbagai kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan publik seperti memberikan informasi keuangan, program kerja, pencapaian target, kegiatan sosial, dan berbagai hal yang lebih dapat meningkatkan pemahaman publik pada DPRD Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Media relations menjadi salah satu bagian yang dapat dimanfaatkan humas untuk dapat disusun dan dimanfaatkan sebagai sarana penting guna mencapai pemahaman dan dukungan publik. Seringnya, publik menilai kinerja DPRD berdasarkan informasi dari media massa karena media massa dinilai publik sebagai pihak yang dianggap netral. Meskipun sering ditemukan perbedaan cara penyampaian informasi terkait dengan cara media memberitakan, hingga kepentingan-kepentingan subjektif para pelaku media, memungkinkan perbedaan informasi antara informasi dari media dengan informasi dari instansi kelembagaan pemerintah yang dimintai informasinya. Persengketaan informasi tersebut umumnya terjadi karena berbagai kelemahan pada instansi pemerintah yang dimintai informasi.

Tantangan yang dihadapi Humas DPRD Provinsi Riau dalam memainkan perannya juga tidak mudah. Kemajuan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah peradaban dunia yang cukup berarti. Dampak kemajuan teknologi tersebut merasuk hampir ke seluruh segi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian masyarakat menjadi semakin kritis menyikapi berbagai persoalan, termasuk tingkat keterbukaan informasi. Kesenjangan pemberitaan yang diharapkan DPRD Provinsi Riau dengan yang diberitakan para pelaku media dapat diminimalisir dengan cara melibatkan pers secara lebih aktif pada berbagai kegiatan DPRD Provinsi Riau. Hubungan baik dengan pihak media sangat penting untuk dibina Humas DPRD Provinsi Riau karena menjadi bagian penting untuk membangun publisitas dan keterbukaan informasi yang lebih baik mengenai kinerja DPRD Provinsi Riau. Berbagai kegiatan *media relations* bagi para pelaku media sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi salah satu bentuk dari upaya Humas DPRD Provinsi Riau dalam mencari publisitas positif. Dari situ juga terlihat bahwa *media relations* memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan opini publik terhadap citra DPRD Provinsi Riau. Selain itu *media relations* memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyebaran program dan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau.

Pemberitaan yang cenderung bernada negatif seperti berita mengenai program dan kebijakan DPRD Provinsi Riau yang dinilai kurang maksimal akan sangat rentan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membentuk opini Publik yang kurang baik terhadap kinerja DPRD Provinsi Riau. Karena diperlukan upaya serius dari Humas DPRD Provinsi Riau dalam menjalin kerjasama yang baik dengan pihak media, sehingga proses penyampaian informasi atau pesan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Untuk itu penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai “Pelaksanaan *media relations* Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau”

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memiliki beberapa alasan dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *media relations* perlu dilakukan untuk membangun relasi yang baik antara humas pemerintah dengan pihak media (wartawan).
2. Penulis merasa mampu untuk meneliti baik dari segi waktu, tempat, tenaga dan dana.
3. Sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang pelaksanaan *media relations* Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Sesuai dengan bidang kajian Ilmu Komunikasi konsentrasi *Public Relations* yang penulis tekuni di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan digunakan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan
Secara bahasa, pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya). Sedangkan secara istilah, pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.⁴

2. *Media relations*

Media relations merupakan salah satu bagian dari fungsi eksternal humas yang dijadikan sebagai sarana humas untuk lebih mengenal publik melalui pihak-pihak yang mewakili kepentingan publik. Media massa, pers dan para pelaku komunikasi massa lainnya dapat menjadi bagian langsung yang dibina hubungan baiknya oleh humas guna mendapatkan pemberitaan yang lebih mendukung keberadaan organisasi. *Media relations* berkenaan dengan pihak eksternal, sehingga upaya pembinaannya pun berbeda dengan kepentingan internal karena pihak eksternal berada di luar dari jangkauan struktural organisasi.⁵

3. Humas

Humas adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya menyangkut aktifitas komunikasi, penerimaan dan kerjasama melibatkan manajemen dalam persoalan atau permasalahan perubahan secara efektif, bertindak sesuai sistem peringatan didalam mengantisipasi kecenderungan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat sebagai sarana utama.⁶

4. DPRD Provinsi Riau

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 3 tentang “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai

⁴ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

⁵ Rini Darmastuti, *Media relations Konsep. Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta:ANDI Yogyakarta,2012), hal 42.

⁶ Sandra Oliver, *Strategi Public Relations*, (London, Erlangga,2007), hal 2.

lembaga unikameral yang berkedudukan di Provinsi Riau, DPRD Riau menempatkan 65 orang wakilnya yang tersebar di delapan fraksi.⁷

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu, “Bagaimana pelaksanaan *media relations* Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa pelaksanaan *media relations* Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini dapat menambah referensi pengetahuan dan teori tentang *media relations*.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan *media relations* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Demikian pula secara tidak langsung penelitian ini memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja Humas DPRD Provinsi Riau.

G. Sistematika Penulisan

Agar mengetahui secara jelas keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat ditulis susunan sistematika penulisan sebagai berikut:

⁷ www.dprd.riau.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penulisan dalam pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini membahas tentang kajian teori yang mendukung penyusunan penelitian ini, penegasan istilah, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV: DESKRIPSI UMUM

Pada bab ini membahas tentang deskripsi umum tempat penelitian dalam hal ini adalah Humas DPRD Provinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas gambaran umum penelitian dan pembahasan hasil dari penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat bagi pembaca dan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai masukan ataupun pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A Kajian Teori

Untuk memperoleh pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis menjelaskan definisi sesuai dengan judul.

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁸

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana caranya harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁹

⁸Nuridin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70.

⁹Abdullah Syukur. 1987. "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi, Ujung Pandang,hal. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaituterpenuhi jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
- d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:¹⁰

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program

¹⁰ Abdullah Syukur, *Ibid*, hal. 398.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan dan peningkatan.

- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung dalam pengelolaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Media relations

a. Pengertian *Media relations*

Menarik menyimak pernyataan Lesly menjelaskan *media relations* sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespons kepentingan media terhadap organisasi. Apa yang dilakukan oleh Lesly ini lebih pada sisi manfaat yang diperoleh organisasi dan kegiatan yang dilakukan organisasi dalam menjalankan *media relations*. Manfaat tersebut berupa publisitas.¹¹

Uraian tentang *media relations* bisa dilihat keterkaitannya untuk membentuk pengertian *media relations*. Pertama, *media relations* itu berkenaan dengan media komunikasi. Media komunikasi ini diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien dalam berkomunikasi dengan publik. Agar komunikasi dengan publik tersebut bisa terpelihara, maka segala kepentingan media masa terhadap organisasi mesti direspon organisasi. Tujuannya adalah untuk keberhasilan program.¹² Kedua, *media relations* itu pada dasarnya berkenaan dengan pemberian informasi atau memberi tanggapan pada media pemberitaan atas nama organisasi atau klien. Karena hubungan dengan media masa itulah, maka ada yang menyebutkan bahwa *media relations* itu merupakan fungsi khusus didalam satu kegiatan atau program humas. Letak kekhususannya ada pada pelibatan media masa

¹¹Iriantara, Yosol. *Media Relations: Konsep, Pendekatan dan Praktik*, (Bandung:Simbiosia Rekatama Media, 2008), hal. 31.

¹²*Ibid*, hal 32awzz

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berada diluar kendali organisasi untuk menopang pencapaian tujuan organisasi.¹³

Pemahaman mengenai hubungan manusiawi atau *relationship* adalah sangat penting dalam memahami teori komunikasi *interpersonal*. Praktisi humas dalam pekerjaannya kerap harus melakukan komunikasi interpersonal, berbicara secara *face to face* dengan suatu atau beberapa orang lainnya. Mengingat fungsi humas adalah mengiring persepsi dan opini publik terhadap organisasi yang baik. Hal ini didorong oleh seringnya organisasi berhadapan dengan sorotan yang bernada negatif dari masyarakat serta tekanan liputan pihak pers yang menyiarkan berita-berita kritikal tentang organisasi atau pemerintah namun tidak berdasarkan data yang faktual serta obyektif.¹⁴

Inti dari hubungan dengan media massa adalah proses memberi dan melayani, bukannya meminta sesuatu kepada kalangan pers.¹⁵ Oleh karena itu, dalam menjalankan praktik *media relations* tersebut, hendaknya para praktisi humas memperhatikan beberapa prinsip berikut:¹⁶

1. Memahami dan melayani media

Seorang praktisi humas harus memiliki pengetahuan mengenai cara memahami dan melayani media, sehingga dapat menjalin kerjasama dengan pihak media/pers dan dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

2. Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya

Praktisi humas harus selalu siap menyediakan atau mau masuk materi-materi yang akurat dimana saja dan kapan saja. Ini terkait dengan pekerjaan manajer humas sebagai penyedia informasi utama bagi kalangan media masa.¹⁷ Dengan cara ini humas akan menilai sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh media.

¹³ *Ibid*, hal 33

¹⁴ Ruslan, Rosady. *Manajemen Humas dan Media Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 167.

¹⁵ Anggoro, M. Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal 173.

¹⁶ Jefkins. *Public Relations*, (Jakarta: PT. Gelors Aksara Pertama Erlangga, 2004), hal. 101.

¹⁷ *Ibid*, hal. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyediakan salinan yang baik

Menyediakan salinan yang baik dapat dilakukan dengan menyediakan reproduksi foto-foto yang baik, menarik dan jelas.

4. Bekerja sama dalam penyediaan materi

Sebagai contoh seorang praktisi humas dan pers dapat bekerja sama dalam mempersiapkan sebuah acara wawancara atau jumpa pers dengan tokoh-tokoh tertentu.

5. Menyediakan fasilitas verifikasi

Praktisi humas perlu memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk melakukan verifikasi (pembuktian kebenaran) atas setiap materi yang mereka terima. Contohnya, yaitu dengan mengizinkan para wartawan untuk langsung melihat fasilitas atau kondisi organisasi yang hendak diberitakan meskipun memang tidak semua organisasi atau perusahaan mengizinkan wartawan untuk mengetahui seluruh "isi perut" perusahaan.

6. Membangun hubungan personal yang kokoh

Hubungan personal yang kokoh akan tercipta dan terpelihara jika dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran dan sikap saling menghormati profesi masing-masing hubungan baik itu juga perlu dibangun dengan landasan profesionalisme masing-masing.

Sebagai mitra kerja yang strategis seorang praktisi humas tidak hanya mengemban tugas untuk menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan media massa dalam arti organisasinya, melainkan juga media dalam arti personal, yaitu wartawan-wartawan yang tergabung di dalamnya. Komunikasi yang dibangun dengan pihak wartawan tersebut hendaknya bersifat dua arah dan dilakukan secara berkesinambungan, mengingat opini publik bersifat sangat dinamis, dimana dapat berubah-ubah seiring dengan informasi yang diberitakan oleh pihak media. Berikut merupakan gambaran sederhana dari arus komunikasi dalam praktik *media relations*.¹⁸

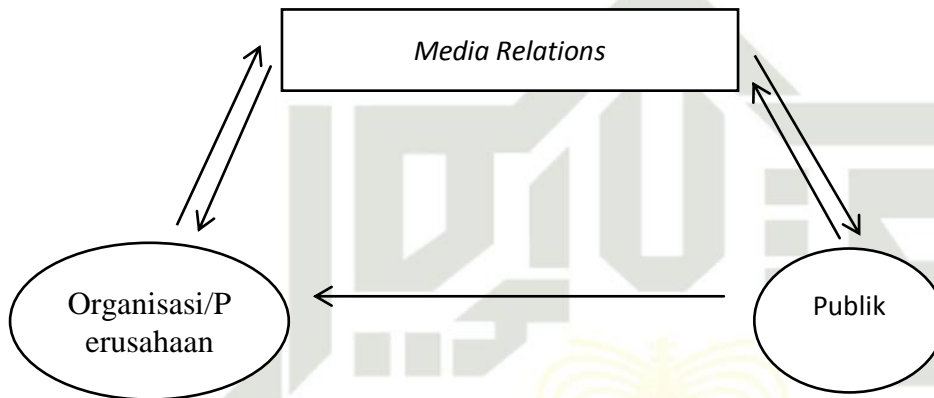
¹⁸Iriantara, Yosol. *Media Relations: Konsep, Pendekatan dan Praktik*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2005), hal. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.A.1

Arus komunikasi dalam praktik *media relations*



Dari bagan tersebut, dapat dilihat Bagaimana arus komunikasi yang terbentuk antara organisasi, media massa dan publik. Garis tipis memperlihatkan arus komunikasi yang dilakukan oleh publik, sedangkan garis tebal memperlihatkan arus komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Dalam bagan diatas, tergambar bahwa media berperan sebagai jembatan antara organisasi dan pabrik organisasi dapat menyampaikan informasi-informasinya kepada publik melalui media massa. Publik pun menyampaikan aspirasi, saran dan kritiknya kepada suatu organisasi melalui media massa meskipun terkadang publik memiliki akses langsung untuk menyampaikan aspirasinya kepada organisasi, namun penyampaian aspirasi melalui media massa cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat mengingat kemampuan media massa yang besar dan mempengaruhi opini public dan citra suatu organisasi.

Menurut Pat Bowman dan Nigel Ellis, jika praktisi humas maka ia harus dapat menginterpretasikan media. Demikian pula jika praktisi humas ingin menyampaikan suatu hal atau isu kepada masyarakat, media adalah sarana utamanya hal tersebut secara tidak langsung telah menempatkan media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai barometer untuk mengukur kecenderungan baik buruknya citra suatu organisasi terkait fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

b. Tujuan *Media relations*

Perusahaan yang menjalankan program *media relations*, pada umumnya adalah perusahaan yang sangat membutuhkan dukungan media masa dalam pencapaian tujuan organisasi. Secara rincian tujuan *media relations* bagi organisasi adalah:¹⁹

1. Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah lembaga atau organisasi untuk diketahui umum.
2. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, ulasan, tajuk yang wajar, obyektif dan seimbang) mengenai hal-hal yang menguntungkan lembaga atau organisasi.
3. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan lembaga atau organisasi.
4. Untuk melengkapi dan atau informasi bagi pimpinan lembaga atau organisasi bagi keperluan pembuatan secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan lembaga atau perusahaan.
5. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghormati.

Intinya program *media relations* dijalankan oleh humas untuk menjaga hubungan baik dengan pihak media massa. Wartawan adalah manusia yang memiliki hak-hak untuk dihargai dan dihormati, oleh karena itu *media relations* atau menjalin hubungan dengan media dengan cara human communication yang berempati, manusiawi serta saling menghormati akan membuat hubungan wartawan dengan praktisi humas serta organisasi akan berjalan dengan lebih baik.

¹⁹Wardhani, Diah. *Media relations : Sarana Membangun Reputasi Organisasi*,(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2008, cetakan pertama).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui aktifitas *media relations*, maka hubungan antara organisasi dengan media yang diwakili oleh humas dengan wartawan diharapkan akan lebih baik dan positif. Dengan demikian manfaat *media relations* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Manfaat *media relations* antara lain adalah:

1. Membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan media massa.
2. Membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip menghormati dan menghargai, kejujuran serta kepercayaan.
3. Menyampaikan atau peroleh informasi yang akurat, jujur dan mampu memberikan pencerahan bagi publik.

c. Pelaksanaan *Media relations*

Hubungan baik yang terbangun antara humas dengan media massa (Institusi Media dan Wartawan) bukanlah tujuan utama dari kegiatan *media relations* yang dilakukan oleh humas. Tujuan utama dari *media relations* adalah terciptanya hubungan yang baik antara instansi/perusahaan dengan *stakeholder*-nya sehingga tercipta kepercayaan dalam diri masyarakat terhadap instansi/perusahaan tersebut.²⁰

Untuk mencapai tujuan utama ini, seorang praktisi humas membutuhkan media massa untuk menjangkau *stakeholder*-nya yang bersifat masif dan berada ditempat yang terpisah-pisah. Berdasarkan alur berpikir inilah maka dibutuhkan hubungan yang baik antara humas dengan wartawan supaya pesan yang dibuat oleh praktisi humas tersebut dapat dipublikasikan oleh media massa dan sampai kepada masyarakat.

Hubungan antara humas dengan institusi media maupun dengan wartawan akan terjadi secara efektif apabila hubungan ini dibangun dengan menggunakan strategi *media relations* yang tepat. salah satu strategi *media relations* yang dapat digunakan untuk membangun hubungan yang manis antara humas dengan media massa adalah strategi *media relations* dengan menggunakan *Reciprocity Model*. ada beberapa ciri dalam model hubungan

²⁰Darmastuti, Rini. *Media relations Konsep, Strategi & Aplikasi*, (Yogyakarta, 2012), hal 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reciprocity yang terjalin antara humas dengan media massa. Ciri-ciri tersebut adalah:²¹

1. Hubungan yang dibangun memiliki tujuan untuk menciptakan suatu perdamaian
2. Dalam hubungan ini setiap orang memiliki kebebasan
3. Kebenaran menjadi satu hal yang sangat dihargai dalam hubungan ini kekeluargaan menjadi dasar dalam membangun hubungan antara humas dengan institusi media dan wartawan maupun dengan pekerja media
4. Masing-masing anggota dalam interaksi yang terjadi memiliki kesadaran untuk mengoreksi kesalahan mereka sendiri
5. Hubungan yang terjalin adalah hubungan yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain dalam nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain)
6. Hubungan dilakukan secara sukarela
7. Dalam hubungan ini, masing-masing anggota memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan mereka
8. Hubungan dilakukan dalam tindakan, tingkah laku atau perasaan
9. Dalam model hubungan *Reciprocity* ini ada dua fenomena yang sangat mempengaruhi yaitu rasa terima kasih dan menirukan.

Untuk menunjang keberhasilan strategi *media relations* yang dilakukan dengan menggunakan model hubungan *Reciprocity* ini maka diperlukan kegiatan *media relations* yang menunjang kegiatan tersebut. Ada beberapa kegiatan *media relations* yang dapat dilakukan oleh seorang praktisi humas. Secara garis besar kegiatan *media relations* itu dibagi menjadi dua, yaitu acara-acara *media relations* (event) dan tulisan *media relations*.

Sarah silver dalam bukunya *A Media relations Handbook for governmental organization* menyebutkan ada beberapa kegiatan *media relations* (dalam

²¹*Ibid*, hal 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk acara-acara *media relations* dan tulisan *media relations*) adalah sebagai berikut:²²

- a. Kegiatan *media relations* dalam bentuk acara-acara *media relations* (*event*)

1. Konferensi pers (*Press conference*)

Konferensi pers merupakan sebuah pertemuan para jurnalistik yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan topik topik yang sedang hangat dibicarakan.²³ Bisa juga konferensi pers ini sengaja dilakukan oleh instansi atau perusahaan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan tersebut kepada jurnalis. Perusahaan biasanya mengadakan konferensi pers ini ketika perusahaan sedang mengalami permasalahan atau sedang berkonflik dengan pihak lain. Konferensi pers ini diadakan dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi untuk memperbaiki Citra perusahaan yang sempat rusak. Tidak jarang konferensi pers diadakan secara mendadak dengan tempat seadanya.

2. Resepsi pers (*Press reception*)

Resepsi pers merupakan acara berkumpul-kumpul para jurnalis dalam kondisi yang santai dan menyenangkan. Acara ini biasanya dilakukan secara informal dalam satu acara yang sudah direncanakan dan lebih terorganisasi. Dalam acara resepsi pers ini, para pemburu berita diundang untuk meliput suatu acara, mendengarkan keterangan-keterangan resmi atau sekadar bercakap-cakap dengan tujuan supaya terbangun kedekatan antara pemburu berita ini dengan pihak perusahaan atau organisasi yang berperan sebagai penyelenggara acara ini.²⁴ Acara yang dilaksanakan secara santai ini biasanya disertai dengan jamuan, baik itu jamuan makan siang maupun jamuan makan malam di beberapa perusahaan atau

²²*Ibid*, hal 179

²³Jefkins, Frank, *Public Relations*, (Jakarta:Erlangga,1992), hal. 119.

²⁴*Ibid*, hal. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, resepsi pers hanya dilakukan secara rutin satu bulan sekali atau setengah tahun sekali.

3. Kunjungan pers (*Media Visit*)

Untuk memperjelas berita yang dibuat, seringkali sebuah perusahaan atau organisasi mengundang wartawan atau pekerja media untuk mengunjungi perusahaan atau organisasi mereka.²⁵

4. *Press Calls*

Press calls adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang praktisi humas dari suatu perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan suatu informasi atau berita kepada pekerja media dengan menggunakan telepon.

5. *Media Briefing*

Media briefing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang humas untuk memberikan penjelasan singkat kepada para jurnalis sebelum suatu kegiatan dilakukan. Tujuannya, supaya setiap wartawan yang terlibat dalam acara tersebut mengetahui tata cara dan aturan aturan yang berlaku selama acara itu dilakukan, dengan harapan supaya kegiatan peliputan yang dilakukan oleh wartawan tidak mengganggu acara yang diadakan.

6. *Media Event*

Media event yang dimaksud disini adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengundang media massa (baik cetak maupun elektronik) ketika perusahaan itu menjadi sponsor dalam launching suatu produk.

7. *Radio, Television, Newspaper and Magazine Interviews*

Selain beberapa kegiatan yang dilakukan oleh humas seperti disebutkan sebelumnya, ada beberapa acara pers yang bisa dilakukan oleh humas sebagai kegiatan *media relations*. Acara-acara tersebut adalah *interview* di radio, televisi, koran maupun majalah. Yang

²⁵ Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan *interview* adalah media massa tersebut melakukan *interview* dengan beberapa narasumber dari perusahaan tersebut tentang suatu topik atau permasalahan yang sedang hangat pada saat ini.

8. *Radio Talk Show and television Talk Show*

Radio talk show and television talk show merupakan diskusi interaktif yang diadakan antara pihak radio atau televisi dengan narasumber dari perusahaan atau organisasi tertentu.²⁶

9. *Development of your Organization's Own Radio or Television Program*

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengembangkan program program televisi atau program radio dari organisasi atau perusahaan itu sendiri.

10. *Meeting With Editor*

Bertemu dengan editor menjadi salah satu hal penting. Sayangnya, kegiatan ini seringkali kurang mendapat perhatian karena selama ini penekanan praktisi humas hanya pada penulisan *release* atau konferensi pers. Ada banyak keuntungan ketika humas menyediakan waktunya untuk bertemu dan diskusi dengan editor. Keuntungan tersebut adalah pertama, dengan bertemu dan berdiskusi dengan editor, seorang praktisi humas akan mengerti tema dan topik yang sedang dibahas di media massa tersebut dalam minggu itu. Kedua, bertemu dengan editor akan membuat praktisi humas tahu tentang aturan menulis dan 'selera' menulis di media massa tersebut. Ketiga, bertemu dan berdiskusi dengan editor akan menciptakan hubungan yang lebih dekat antara humas dengan editor dan institusi media tempat editor itu bekerja.

b. Kegiatan *media relations* dalam bentuk tulisan

1. *Press Release*

²⁶Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warren K Agee dkk. dalam bukunya *An Introduction to Mass Communications* memberikan definisi tentang press release sebagai berikut, “A press release is a piece of new written by organization whose activities it describes”. Dalam pengertian yang diberikan oleh Warren ini, *press release* merupakan sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi yang menggambarkan kegiatannya.

Jefkins memberikan pengertian yang lebih luas tentang *press release*. Dalam pandangan Jefkins, sebuah rilis bukan sekadar tulisan dalam bentuk tulisan pers tetapi bisa juga dalam bentuk artikel dan foto-foto *caption* yang memiliki nilai berita yang tinggi.²⁷

Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *press release* adalah bentuk komunikasi yang diterima antara institusi dan reporter. *Release* ini menjadi satu kesempatan untuk menyalurkan fakta dan pandangan dari sebuah organisasi terhadap suatu permasalahan

2. *Placing Opinion Pieces in the Local Newspaper*

merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menempatkan opini-opini yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang menjadi bagian dari kegiatan *media relations* pada surat kabar lokal yang ada di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun opini masyarakat tentang organisasi atau perusahaan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan atau organisasi itu.

3. *Letter to the Editor of of the Local Newspaper*

Membuat suatu surat atau tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada editor merupakan satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh humas. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat digunakan sebagai peluang bagi humas untuk membuat publisitas.

Publisitas dapat dilakukan oleh humas dengan menggunakan banyak cara, mulai dari membuat release, membuat opini, memberikan masukan ke editor hingga membuat surat pembaca. Bahkan

²⁷*Ibid*, hal 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat tulisan-tulisan lain juga memungkinkan, seperti tulisan dalam bentuk *feature*.

Memang selama ini tulisan-tulisan yang dibuat oleh humas lebih banyak dalam bentuk *straight news*. Tetapi perkembangan yang ada saat ini memungkinkan humas untuk membuat tulisan-tulisan dalam bentuk *feature* (tulisan mendalam tentang suatu hal) atau gabungan atau perkawinan antara *feature* dan *straight news*.

Tulisan-tulisan dalam bentuk gabungan ini merupakan bentuk tulisan iklan yang ditulis dalam bentuk *straight news*. Contohnya adalah tulisan dalam bentuk *corpotorial*, *advertorial* maupun bentuk tulisan-tulisan lain.

4. *Public Service Announcement*

Bentuk tulisan lain dalam kegiatan *media relations* adalah pemberitahuan-pemberitahuan layanan publik. Pemberitahuan pemberitahuan layanan publik ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial suatu perusahaan kepada masyarakat.²⁸

5. *In-house Publication, Newsletters*

Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seorang humas bukan hanya komunikasi eksternal, tetapi juga komunikasi internal. Oleh karena itu, kegiatan dalam penulisan untuk pers bukan hanya dilakukan untuk pihak eksternal, tetapi juga untuk pihak internal. Komunikasi untuk pihak internal dapat dilakukan dengan membuat *in-house publication* seperti *house journal* maupun dengan membuat *newsletter*.

6. *Electronic Communication*

Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang bagi seorang praktisi humas dalam melakukan kegiatan *media relations*. Dengan perkembangan teknologi komunikasi ini, kegiatan *media relations*

²⁸ Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dilakukan dengan menggunakan media elektronik, termasuk internet.

Komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan e-mail maupun melakukan publisitas dengan menggunakan media internet. Sebut misalnya membuat iklan dengan menggunakan media internet, memasang iklan pada media internet, maupun berkomunikasi dengan menggunakan media sosia. Dengan cara seperti ini, khalayak yang dapat dijangkau oleh humas akan semakin banyak dan semakin luas di sisi lain pekerjaan humas juga menjadi semakin ringan.

7. *Banner*

Banner merupakan media komunikasi tertulis yang dapat dilakukan oleh humas untuk mempublikasikan perusahaan atau organisasi tempat humas itu berada.

8. *Website*

Salah satu media komunikasi tulis yang paling efektif yang dapat digunakan oleh praktisi humas dalam menyampaikan informasi tentang perusahaan tempat humas itu berada adalah website. Website yang menarik akan membuat pengunjung web menyukai web tersebut dan semakin dalam mengakses informasi yang diajukan oleh perusahaan tersebut.²⁹

Humas (Hubungan Masyarakat)

a. Pengertian Humas

Hubungan masyarakat adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara satu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Hubungan yang harmonis ini timbul dari adanya *mutual understanding*, *mutual confidence* dan *image* yang baik. Ini semua merupakan langkah-langkah

²⁹*Ibid*, hal 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus ditempuh oleh Humas untuk mencapai hubungan yang harmonis.³⁰

Hubungan masyarakat merupakan fungsi manajemen khusus yang membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, saling pengertian, penerimaan dan kerjasama antara organisasi dan masyarakatnya, yang melibatkan manajemen problem atau masalah, membantu manajemen untuk selalu mendapat informasi dan merespon pendapat umum. Mendefenisasi dan menekankan tanggung jawab dalam melayani kepentingan masyarakat, membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai sistem peringatan awal untuk membantu mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan riset serta komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sarana utamanya.³¹

Humas sama seperti bagian divisi lain didalam perusahaan, untuk memberi kontribusi kepada rencana kerja jangka panjang itu, praktisi humas dapat melakukan langkah-langkah ini:³²

1. Menyampaikan fakta dan opini, baik yang beredar didalam maupun diluar perusahaan. Bahan-bahan itu dapat diperoleh dari klipng media massa dalam kurun waktu tertentu, dengan melakukan penelitian terhadap naskah-naskah pidato pimpinan, bahan yang dipublikasikan perusahaan, serta melakukan wawancara tertentu dengan pihak yang berkepentingan atau dianggap penting.
2. Menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perusahaan yang terjadi secara historis. Perusahaan umumnya disertai dengan sikap perusahaan dengan publiknya atau sebaliknya.
3. Melakukan analisis SWOT *Strenghts*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/ancaman). Meski tidak perlu menganalisis hal-hal yang berada diluar jangkauannya, seorang praktisi

³⁰ Linggar Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 2.

³¹ Cutlip, *Effective Public Relations Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan dengan Sukses*, (Jakarta: PT. INDEKS Kelompok GRAMEDIA, 2005), hal 4.

³² Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto. *Dasar-dasar Public Relations*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hal 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

humas perlu melakukan analisis yang berbobot mengenai persepsi luar dan dalam perusahaan atas SWOT yang dimilikinya.

Berdasarkan rumusan itulah seorang praktisi humas dapat menentukan langkah yang dapat diambil serta program kerja yang akan disusun. Dengan pendekatan ini, praktis langkah yang diambil oleh seorang praktisi humas akan lebih selaras dengan arah secara menyeluruh.³³

Menurut Dominick, humas mencakup hal-hal sebagai berikut:³⁴

- 1) Humas memiliki kaitan erat dengan opini publik.

Pada satu sisi, praktisi humas berupaya untuk mempengaruhi publik agar memberikan opini yang positif bagi organisasi atau perusahaan, namun pada sisi lain humas harus berupaya mengumpulkan informasi dari khalayak, menginterpretasikan informasi itu dan melaporkannya kepada manajemen jika informasi itu memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen.

- 2) Humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi.

Praktisi humas bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan kepada khalayak yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan. Khalayak yang berkepentingan akan selalu tertarik dengan apa saja yang dilakukan perusahaan. Praktisi humas harus memberikan perhatian terhadap pikiran dan perasaan khalayak terhadap organisasi. Humas harus menjadi saluran arus bolak-balik antara organisasi dan khalayaknya. Organisasi pada dasarnya berhubungan dengan berbagai macam khalayak.

- 3) Humas merupakan fungsi manajemen.

Humas berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Humas juga harus secara rutin memberikan saran kepada manajemen. Humas harus memiliki kegiatan yang terencana dengan baik.

³³ *Ibid*

³⁴ Morissan, Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian humas harus mampu mengorganisir dan mengarahkan dirinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Tugas Humas

1. Penasehat bagi semua pihak yang membutuhkan data berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukannya
2. Membimbing bagian-bagian bawahannya
3. Berhubungan dengan media sebagai juru bicara dalam konferensi pers dan kegiatan lain yang serupa
4. Menyusun laporan tahunan untuk dipublikasikan
5. Membantu pemasaran, periklanan, pelayanan, open house, kongres dan lain-lain
6. Penelitian untuk meningkatkan komunikasi yang efektif
7. Menyediakan sarana-sarana audio visual
8. Membuat dokumentasi dan alamat-alamat sebagai sarana komunikasi.

Ruang lingkup dari tugas humas dalam menjalin hubungan kedalam (*internal*) dan keluar (*eksternal*) meliputi:

a. Hubungan *public internal*

yang dimaksud dengan *public internal* adalah publik yang menjadi bagian dari unit atau badan perusahaan itu sendiri. Mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang dapat menimbulkan dan mengakibatkan perspektif negatif dalam masyarakat atas kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan.

Adapun tujuan humas dalam menjalin hubungan *internal* mencakup beberapa hal yaitu:

1. Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap opini public yang beredar terhadap perusahaan.
2. Melakukan analisa dan perbaikan terhadap kebijakan yang dijalankan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Merencanakan bagi penyusunan suatu staf yang efektif bagi penegasan yang bersifat internal.

b. Hubungan *public eksternal*

Publik eksternal adalah publik yang berada diluar dari suatu perusahaan itu yaitu masyarakat atau khalayak luas.

Tujuan humas dalam menjalin hubungan eksternal mencakup beberapa hal:

1. melakukan tindakan publikasi seperti membuat kalender, agenda, iklan, menyelenggarakan *event* kemasyarakatan seperti olahraga persahabatan, dan lain sebagainya.
2. Menyebarkan informasi yang telah dicapai perusahaan kepada publik.
3. Memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan publiknya, sehubungan telah terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kecaman, kesansian atau salah paham dikalangan masyarakat terhadap niat baik perusahaan.
4. meyakinkan publik bahwa perusahaan mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadinya suatu krisis.³⁵

c. **Humas Pemerintah**

Dalam suatu pemerintahan, humas pemerintah sangat berbeda dengan humas yang bukan pemerintah. Humas pemerintah tidaklah mempunyai sesuatu yang diperdagangkan, walaupun demikian humas pemerintah juga senantiasa menggunakan teknik strategi pemerintah dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan publik atau masyarakat.

Ruang lingkup mengenai keberadaan humas dan kode etik humas pemerintah sudah diatur dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 371/Kep/Menkominfo/8/2007 pada Bab IV tentang Kode Etik Humas Pemerintah:

³⁵ Linggar Anggoro, Op.Cit., hal 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anggota humas pemerintah wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi/institusinya dengan perundangan yang berlaku.
2. Anggota humas pemerintah tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi (publisitas) pribadi/golongan/organisasi/instansinya.
3. Anggota humas pemerintah menghargai, menghormati dan membina hubungan baik dengan profesi lainnya.

Media Massa

Penyebarluasan informasi mengenai kebijakan sebuah lembaga pemerintah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan media massa atau pers. Berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dijelaskan bahwa media massa atau pers adalah lembaga sosial dan Wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Lembaga atau organisasi media massa itu sendiri digerakkan oleh sekelompok orang yang memegang jabatan fungsional Sebagai wartawan, dengan jabatan struktural yang beragam mulai di pimpinan umum, pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur koordinator liputan reporter dan lain sebagainya.

Media massa memiliki fungsi strategis bagi masyarakat atau khalayak yaitu fungsi menyiarkan (*to inform*), fungsi mendidik (*to educate*) fungsi menghibur (*to entertain*) dan fungsi mempengaruhi (*to influence*). Fungsi mempengaruhi (*to influence*) merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh media massa, yang seringkali dikaitkan dengan fungsi agenda setting. Douglas Carter, pengarang buku *The Fourth Branch of Government* menjelaskan fungsi agenda setting pers sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Kekuatan esensial dari pers adalah terkait dengan kapasitasnya dalam memilih apa yang menjadi berita. Setiap hari di kota Washington, ada puluhan ribu kata yang diucapkan yang dianggap penting oleh mereka yang mengucapkannya. Ada ratusan peristiwa terjadi setiap hari dan peristiwa sebetulnya dianggap layak untuk diberitakan oleh mereka yang mengadakannya. Pers mempunyai kekuatan untuk memilih memutuskan peristiwa mana yang akan ditempatkan di halaman pertama atau yang akan menjadi berita utama TV dan berita mana yang diabaikan"³⁶

Kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi berita itu jugalah yang pada akhirnya membuat banyak praktisi humas dari berbagai perusahaan berlomba-lomba menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Dengan hubungan yang baik tersebut, diharapkan media massa dapat memberikan publikasi yang positif dan berimbang terhadap perusahaan tersebut sehingga dapat menumbuhkan citra positif perusahaan atau organisasi tersebut di mata publiknya melalui berita-berita yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardhani (2008) yang menyebutkan bahwa bagi organisasi, media massa mempunyai peranan penting dalam menyebarluaskan informasi kepada khalayak untuk mendapatkan pencitraan yang baik.

Lebih lanjut, Harold D. Laswell dan Charles Wright menyebutkan ada 4 fungsi sosial yang dimiliki oleh media massa, antara lain:

1. Pengamatan sosial

Fungsi pengamatan sosial merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang objektif oleh media massa seputar berbagai peristiwa yang terjadi didalam dan diluar lingkungan sosial dengan tujuan melakukan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Korelasi sosial

Fungsi korelasi sosial merujuk pada upaya pemberian informasi dan interpretasi oleh media massa yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lain, atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus.

³⁶Lattimore et al, 2010, p.201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sosialisasi

Fungsi sosialisasi merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi atau kelompok ke generasi atau kelompok lainnya yang dilakukan oleh media massa.

4. Hiburan

Fungsi hiburan merujuk pada upaya yang dilakukan media massa untuk memberikan informasi dalam berbagai variasi berita yang bertujuan untuk memberikan hiburan yang sehat dan kesenangan bagi masyarakat.

Selain keempat fungsi sosial di atas, media massa juga memiliki beberapa peranan yang dapat dilihat dari 6 perspektif yang berbeda. Pertama, media massa dilihat sebagai window on events and experience. Dalam hal ini, media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak 'melihat' apa yang sedang terjadi di luar sana. Kedua, media seringkali juga dianggap sebagai a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection. Dalam hal ini, media massa menjadi cermin dari berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa yang terjadi secara apa adanya. Ketiga, media massa dipandang sebagai filter atau getkeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Dalam hal ini, media senantiasa memilih isu informasi atau bentuk konten lainnya berdasarkan standar para pengelolanya. Keempat, media massa seringkali juga dianggap sebagai guide, penunjuk jalan atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam. Kelima, media massa juga bisa dilihat sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Yang terakhir, media massa dapat juga berperan sebagai "teman bicara" yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, melainkan juga sebagai partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Peran Media Massa Sebagai Publisitas

Publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan oleh media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Jefkins memberikan pengertian yang sangat sederhana tentang publisitas ini sebagai dampak dari diketahuinya suatu informasi. Selain pengertian ini Jefkins memberikan definisi yang lebih lengkap tentang publisitas, yaitu sebagai 'suatu' yang bisa dicari atau direkayasa. Karena secara definitif, publisitas merupakan hasil, akibat atau dampak dari diumumkannya suatu informasi. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa publisitas adalah :³⁷

1. Informasi berasal dari luar media.
2. Pesan yang tidak terkontrol dalam menempatkan pesan di media karena sumber pesan (komunikator) tidak membayar kepada institusi media yang memuat berita yang dikirim oleh sumber berita.
3. Suatu pesan yang dapat direkayasa
4. Suatu hasil, akibat, atau dampak dari diumumkannya suatu informasi.
5. Lesly mempertegas pendapat ini dengan mengatakan bahwa publisitas adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan, tujuannya adalah untuk kepentingan organisasi maupun perorangan pembayaran pada media.³⁸

b. Peranan Publisitas

Fungsi publisitas tidak bisa dilepas dari fungsi komunikasi massa. Joseph Devito dalam buku Rini Darmastuti yang berjudul *media relations: konsep, strategi dan aplikasi*. Mengatakan bahwa fungsi dari komunikasi massa adalah:³⁹

- 1) Untuk Menghibur
Pada fungsinya ini, media massa berusaha untuk membuat program-program untuk menghibur masyarakat.
- 2) Untuk Meyakinkan

³⁷Rini Darnastuti, *Media relations*Konsep, Strategi Dan Aplikasi,(Yogyakarta,2012), hal 31

³⁸*Ibid*, hal 31

³⁹*Ibid*, hal 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi media massa yang paling penting adalah untuk meyakinkan (*to persuade*). Persuasi ini dapat disampaikan dalam bermacam-macam bentuk, yaitu :

- a) Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan dan nilai seseorang.
 - b) Mengubah sikap, kepercayaan atau nilai seseorang.
 - c) Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu.
 - d) Memperkenalkan etika atau menawarkan sistem nilai tertentu.
- 3) Untuk Mengukuhkan
Tidak dipungkiri, mengubah perilaku seseorang atau kelompok tertentu merupakan suatu tindakan yang sangat berat dan susah. Tetapi media massa dengan segala kekuatan dan sumber dayanya mampu mengukuhkan atau membuat kepercayaan, sikap, nilai dan opini dalam kehidupan masyarakat.
 - 4) Untuk mengubah
Media akan mengubah pendapat, sikap, serta opini beberapa orang yang tidak memihak dalam suatu masalah tertentu. Disisi lain, media media juga akan menghasilkan banyak perubahan yang kita anggap sepele.
 - 5) Untuk menggerakkan
Dari sudut pandang pengiklan, fungsi terpenting dari media adalah menggerakkan konsumen untuk mengambil tindakan, media maupun menggerakkan masyarakat untuk menggunakan merk-merk tertentu.
 - 6) Menawarkan etika atau sistem nilai tertentu
Dengan mengungkapkan secara terbuka adanya penyimpangan tertentu dari suatu norma yang berlaku, media merangsang masyarakat untuk mengubah sesuatu.
 - 7) Menginformasikan
Fungsi yang tidak kalah penting yang dimiliki oleh media massa adalah fungsi untuk menginformasikan. Sebagian besar informasi yang kita dapatkan dalam hidup kita ini bukanlah hanya berasal dari sekolah, tempat kerja, atau keluarga, akan tetapi justru kita peroleh dari media

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

massa. Disinilah media massa memiliki peran yang sangat besar, yaitu dalam menginformasikan sesuatu.⁴⁰

Dari berbagai perspektif di atas, dapat dilihat bahwa peran media dalam kehidupan sosial masyarakat tidak sebatas sebagai sarana hiburan atau melepas ketegangan semata, sebab isi dan informasi yang disajikan pun mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial. Dengan kata lain, gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya akan mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai objek sosial.

Di negara-negara demokrasi, media massa juga kerap dianggap sebagai pilar kekuatan keempat yang bertugas mengawal setiap kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Media massa dianggap sebagai sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen dan inovasi masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lain.

Sebagai lembaga yang independen, bebas dan mengutamakan kepentingan rakyat, media massa harus menyiapkan seluruh informasi dan berita yang menyangkut kepentingan umum dengan terbuka dan berimbang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat karena pers dianggap sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan rakyat di sebuah negara demokrasi.

Saat ini, media massa dapat dibedakan menjadi tiga jenis besar, yaitu media cetak, media elektronik dan media online. Media cetak sendiri terdiri dari surat kabar, majalah dan tabloid. Media elektronik terdiri dari radio, televisi dan film. Sedangkan media online terdiri dari website dan internet.

Kajian Terdahulu

Sebelumnya sudah ditemukan penelitian para akademisi yang melakukan penelitian mengenai *media relatons* humas diantaranya Niko Pratama, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Program Studi Ilmu

⁴⁰*Ibid*, hal 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunikasi, Konsentrasi Hubungan Masyarakat. ISSN:2355-6919, Vol. 2, No.2 Oktober 2015 dengan judul penelitian “**Aktivitas *Media relations* Dinas Pariwisata Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Selatan dalam Publikasi Objek Wisata Pantai Carocok**” yang menyimpulkan hasil penelitian bahwa *Aktivitas Media relations* yang dilakukan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Utara dalam Publikasi Objek Wisata Pantai Carocok dengan melakukan beberapa hal berikut:

- a. Mengirim Siaran Pers (*Press Release*)
- b. Mengadakan *Konferensi Pers*
- c. Mengadakan *Press Tour* (Wisata Pers)

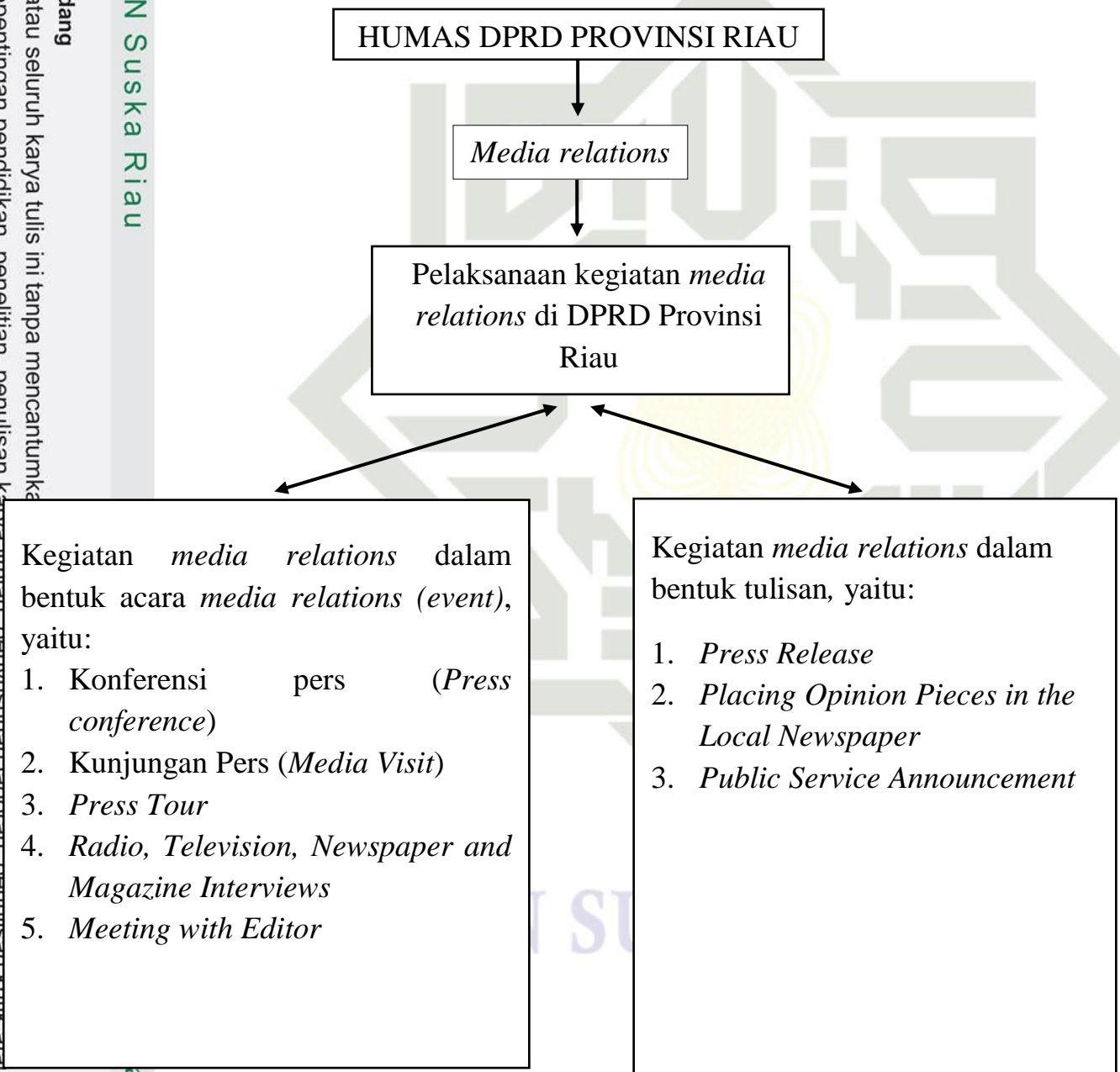
Dalam penulisan yang dilakukan penulis kali ini, penulis mengambil metode yang sama, namun yang membedakan dengan peneliti terdahulu terletak pada objek penelitian yakni mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan *media relations* Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Berfikir

Pelaksanaan *media relations* Humas DPRD Provinsi Riau digunakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan memberikan penerangan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan DPRD Provinsi Riau melalui pendekatan kepada media. Berikut merupakan alur kerangka berfikir dari teori yang ditetapkan oleh peneliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan *media relations* Humas dapat dilihat dari 2 sisi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kegiatan *media relations* dalam bentuk acara (*event*) adalah aktivitas menjalin hubungan baik dengan wartawan, kalangan pers, atau media massa yang diselenggarakan dalam sebuah acara (*event*) guna memberi penjelasan atau memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah lembaga atau organisasi untuk diketahui masyarakat umum. Kegiatan *media relations* dalam bentuk acara (*event*) dibagi atas 5 acara, yaitu:
 1. Konferensi pers (*Press conference*)
Konferensi pers merupakan sebuah pertemuan para jurnalistik yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan topik-topik yang sedang hangat dibicarakan.
 2. Kunjungan Pers (*Media Visit*)
Untuk memperjelas berita yang dibuat, seringkali sebuah perusahaan atau organisasi mengundang wartawan atau pekerja media untuk mengunjungi perusahaan atau organisasi mereka.
 3. *Press Tour*
Press Tour adalah suatu kegiatan yang mengajak insan pers bersama-sama melakukan perjalanan wisata sambil menyampaikan informasi-informasi penting tentang perusahaan atau kegiatan yang dilaksanakan.
 4. *Radio, Television, Newspaper and Magazine Interviews*
Radio talk show and television talk show merupakan diskusi interaktif yang diadakan antara pihak radio atau televisi dengan narasumber dari perusahaan atau organisasi tertentu
 5. *Meeting with Editor*
Pertemuan atau berkumpulnya Humas dan editor untuk berdiskusi dan memutuskan suatu tujuan. Kegiatan ini dilaksanakan guna menciptakan hubungan yang lebih dekat antara humas dengan editor dan institusi media tempat editor itu bekerja.
- b. Kegiatan *media relations* dalam bentuk tulisan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh humas dalam rangka menjalin hubungan baik dengan wartawan, kalangan pers, atau media massa yang diselenggarakan melalui tulisan guna memperoleh publisitas, dukungan mengenai kegiatan serta langkah lembaga atau organisasi untuk diketahui masyarakat umum. Kegiatan *media relations* dalam bentuk tulisan dibagi atas 7, yaitu:
 1. *Press Release*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

press release merupakan sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi yang menggambarkan kegiatannya. *Release* ini menjadi satu kesempatan untuk menyalurkan fakta dan pandangan dari sebuah organisasi terhadap suatu permasalahan

2. *Placing Opinion Pieces in the Local Newspaper*
merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menempatkan opini-opini yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang menjadi bagian dari kegiatan *media relations* pada surat kabar lokal yang ada di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun opini masyarakat tentang organisasi atau perusahaan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh perusahaan atau organisasi itu.
3. *Public Service Announcement*
Bentuk tulisan lain dalam kegiatan *media relations* adalah pemberitahuan-pemberitahuan layanan publik. Pemberitahuan pemberitahuan layanan publik ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial suatu perusahaan kepada masyarakat.

Pelaksanaan *media relations* yang terbangun antara Humas DPRD Prov. Riau dengan wartawan, kalangan pers, atau media massa bertujuan agar terciptanya hubungan yang baik antara instansi dengan *stakeholder*-nya sehingga tercipta pula kepercayaan dalam diri masyarakat terhadap DPRD Prov. Riau. Salah satu pelaksanaan *media relations* yang dapat digunakan untuk membangun hubungan yang manis antara humas dengan media massa adalah dengan menggunakan *Reciprocity Model*.

Kerangka pikir diatas dapat memberikan gambaran dari alur penelitian yang peneliti lakukan melalui konseptualisasi sebagai upaya untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *media relations* Humas DPRD Provinsi Riau.

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan dicarikan cara pemecahannya.⁴¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa.⁴² Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

A. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Sekretariat DPRD Provinsi Riau* yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 719, Pekanbaru Riau dan dikhususkan pada *Kasubbag Humas dan Perpustakaan* dengan waktu penelitian 2 bulan.

C. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif umumnya dilakukan terhadap ukuran sampel yang kecil. Sampel kualitatif cenderung bersifat purposif dan bukan bersifat acak, sebagai akibat

⁴¹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal 1.

⁴² Rakhmat, *Metodologi Penelitian*, 2005, hal 24.

⁴³ Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 239.

dan pembatasan ruang lingkupnya.⁴⁴ Subjek penelitian dari populasi sasaran penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive*. Prinsip dari *purposive sample* adalah mendapatkan seluruh kemungkinan kasus yang sesuai dengan kriteria tertentu menggunakan metode yang beragam (Neuman, 2007: 141). Dalam penelitian ini, subjek dipilih secara *Purposive* sesuai dengan keperluan karena yang dicari dalam penelitian ini adalah kedalaman informasi, bukan kuantitas responden. Subjek dalam penelitian ini adalah Kabag Umum, Kasubbag Humas dan Perpustakaan, Staff bagian Humas Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

D. Sumber Data

1. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok.⁴⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dan observasi. Adapun yang bisa dijadikan sebagai *informan* pada penelitian ini adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau dan Kasubbag Humas dan Perpustakaan.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip dan lainnya yang ada dibagian Humas dan Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagai bahan pelengkap penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses penyampaian data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

⁴⁴ Miles dan Huberman, 1994: 27.

⁴⁵ Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada.2008), hal 29.

Cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan personil untuk mendapatkan data sesuai penelitian.⁴⁶ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara tatap muka langsung (*face to face*) dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam yang berhubungan dengan penelitian yaitu pelaksanaan *media relations* Humas DPRD Provinsi Riau. Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atau respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, dan bila perlu tidak ada yang disembunyikan.⁴⁷ Peneliti mewawancarai Kepala Bagian Umum dan Kasubbag Humas dan Perpustakaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dan narasumber yang terkait sebagai informan.⁴⁸

b. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *nonparticipant observation* (pengamatan tanpa berperan serta) yakni peneliti hanya melakukan satu fungsi untuk pengamatan di lokasi penelitian.⁴⁹ Agar bisa diamati secara pasti dan mendalam bagaimana pelaksanaan *media relations* Humas DPRD Provinsi Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan ataupun dokumen foto, CD dan hardisk/film.⁵⁰ Dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip, dokumen

⁴⁶ P Joko Subagyo, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm, 234.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 151.

⁴⁸ Rakhmat, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2008, hal 34.

⁴⁹ Moleong, *Metodologi dan Teknik Penelitian*, 2005, hal. 176.

⁵⁰ Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Askara, 2016), 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

humas, buku-buku tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Segala hal yang menyangkut dengan hubungan antara humas dan media akan diambil sebagai bahan referensi bagi penulis.

F. Validitas Data

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁵¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi data dengan narasumber, yaitu membandingkan hasil wawancara informan yang satu dengan yang lain sehingga dapat diperoleh data yang akurat.

G. Teknik Analisis Data

Sebelum melaksanakan analisis data, data mentah perlu diolah terlebih dahulu agar dapat dimasukkan ke proses analisis. Data yang akan diolah adalah lembar-lembar instrumen yang telah diisi oleh pengumpul data. Kegiatan persiapan yang dilakukan adalah memeriksa kelengkapan instrumen, yaitu catatan dokumentasi hasil wawancara, catatan lapangan hasil observasi, dan hasil dokumentasi.

Data yang diperoleh dari dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁵²

a. *Data reduction*

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Tujuan reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas atas konsep yang diteliti dan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.⁵³ Dalam penelitian ini, catatan

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Rosdakarya,2007), hal 330-331.

⁵² Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2009: 91.

⁵³ Sugiyono, 2009: 92

dokumentasi hasil wawancara, catatan lapangan hasil observasi, dan hasil dokumentasi direduksi sehingga sesuai dengan fokus masalah, yaitu *Media relations* pada pelaksanaan program dan kebijakan di DPRD Provinsi Riau.

b. *Data display*

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Secara luas, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk grafik, tabel, dan sebagainya. Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa bentuk yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa dan disusun dalam bentuk paragraf deskriptif.

c. *Conclusion drawing/verification*

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan pada awal penelitian. Kesimpulan ini juga dapat berupa pengembangan dari jawaban rumusan permasalahan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah berdirinya DPRD Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958). Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II⁵⁴

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri
4. Kepulauan Riau, termaksud dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)
5. Kotaparaja Pekanbaru, termaksud dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk

⁵⁴ Arsip Humas DPRD Provinsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai tertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai dipikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des. 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Berdasarkan surat penetapan Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus, Riau menjadi sebuah propinsi dan Daerah

administrasi. Dengan ditetapkannya gubernur pertama Provinsi Riau yaitu Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960. Dalam maklumat menteri di tetapkan bahwa Komite Nasional Daerah di bentuk di provinsi dan keresidenan tersebut menjadi kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur rumah tangga sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk suatu badan eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota.

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menjadi daerah otonom yang di delegasikan oleh pemerintah pusat. Di tetapkan melalui peraturan pemerintah No.8 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa provinsi Riau di jalankan oleh Gubernur dan di serahkan kepada Dewan Perimbangan Rakyat dan Badan Eksekutif pemerintah Daerah Riau berhubung dengan pemerintah. Pusat dan berada di bawah Menteri-menteri dan selanjutnya dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di Sumatera keresidenan dan daerah-daerah yang di tunjuk sebagai daerah otonom.

B. Visi dan Misi DPRD Provinsi Riau

Visi dan Misi Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005- 2025 adalah:

VISI

Mewujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Dan Bathin, Di Asia Tenggara Tahun 2020

MISI

Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat;

Arsip Humas DPRD Provinsi Riau

Mewujudkan Supremasi hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia;

Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat;

4. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
5. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis;
6. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan agama, seni budaya dan moral;
7. Mewujudkan kemudahan untuk mengakses dalam bidang transportasi, produksi, komunikasi dan informasi serta pelayanan publik;
8. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa agar mampu berperan sebagai lini terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan;
9. Mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya, sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada.
10. Mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

C. Sekretariat DPRD Provinsi Riau

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi. Sekretariat DPRD adalah satu organisasi daerah di provinsi Riau yang resmiterbentukberdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan taat kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Provinsi Riau, yang merupakan amanat dari peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Organisasi perangkat daerah.

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan

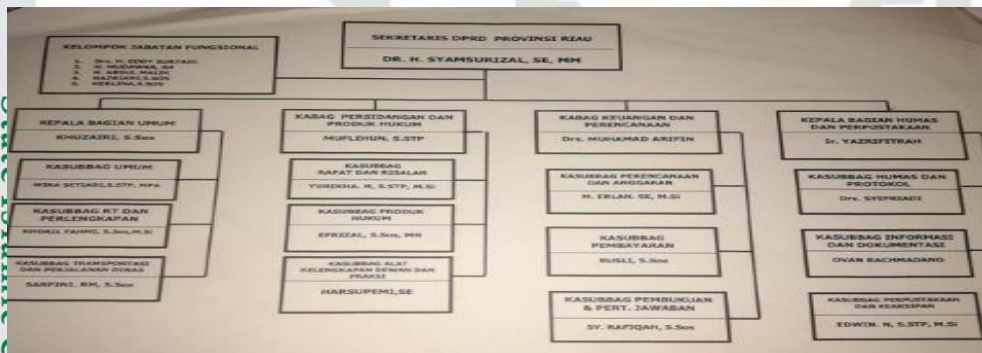
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi menyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan menyediakan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Sekretariat Daerah Propinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Asisten Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah masing-masing terdiri dari 3 (tiga) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian. Dinas terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang. Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi. Badan terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang. Bagian Tata Usaha terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbidang. Kantor terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi. Unit Pelaksana Teknis Dinas /Lembaga Teknis Daerah Propinsi terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dibawah ini adalah gambar susunan struktur organisasi sekretariat DPRD.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi kesekretariatan DPRD



Sumber DPRD Prov. Riau

D. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan peraturan daerah provinsi riau Nomor 1 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Provinsi Riau, menegaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan tugas memimpin sekretariat daerah, membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah, badan dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan dan secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dari uraian tersebut diatas maka tugas pokok Sekretaris DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi perumusan dan penyusunan visi, misi, rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Sekretariat DPRD
- b. Menyalenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
- c. Menyelenggarakan koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dengan SKPD dan instansi terkait;
- d. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menyediakan dan mengkoordinasi kelompok pakar atau Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah lingkup Sekretariat DPRD;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat kunjungan kerja, konsentrasi, konsultasi, workshop/bimbingan teknis, reses, hearing, dan kegiatan DPRD lainnya;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berkaitan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian ; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

E. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekretariat DPRD provinsi Riau perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan kepada dewan perwakilan rakyat daerah masyarakat. Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan peraturan daerah provinsi riau Nomor 1 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Provinsi Riau dimana jumlah pegawainya 185 Orang.

- Jumlah PNS Berdasarkan golongan.

Bila di klasifikasikan kedalam tingkat golongan, maka sebagaimana terlihat pada table 4.1 pegawai sekretariat DPRD provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 96 orang (51,89%).

Tabel. 4.2

PNS Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	9 Orang
2	Golongan III	96 Orang
3	Golongan II	68 Orang
4	Golongan I	12 Orang
Jumlah		185 Orang

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Prov Riau (31 Des 2016)

Jumlah PNS berdasarkan jabatan/eselon

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari jumlah 185 orang pegawai secretariat DPRD Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu secretariat DPRD Provinsi Riau; 4 orang dengan jabatan eselon III, yang terdiri dari 4 Kepala bagian, serta 12 orang jabatan eselon IV yang terdiri dari 12 orang kepala sub bagian dan sisanya sebanyak 166 orang adalah staff.

Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan

Jika melihat tingkat pendidikan aparatur secretariat DPRD Provinsi Riau, maka komposisi pegawai dengan pendidikan SLTA/SMU/D.I/D.II yang terbanyak yaitu berjumlah 89 orang atau sekitar 48,10% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang cukup dan terus ditingkatkan.

Tabel 4.4

PNS sekretaris DPRD Provinsi Riau berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata 2	12 Orang	6,52 %
2	Strata 1	64 Orang	34,59 %
3	Diploma 3	6 Orang	3,26 %
4	SLTA/SMU/D.I/D.II	89 Orang	48,10 %
5	SMP	8 Orang	4,32 %
6	SD	6 Orang	3,26 %
Jumlah		185 Orang	100%

Dalam kaitan untuk mendukung kinerja dan pekerjaan, secretariat DPRD Provinsi Riau di dukung oleh fasilitas penunjang (perlengkapan/peralatan) seperti computer, printer, mesing scanner, dan Fotocopy, kendaraan dinas, ruang kerja di setiap bagian, hingga jaringan WIFI untuk mempermudah akses informasi global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi selama penelitian ini, peneliti sampai pada beberapa poin kesimpulan terkait pelaksanaan *media relations* di DPRD Prov. Riau yaitu dalam pelaksanaan *media relations* di DPRD Prov. Riau, humas lebih banyak mengambil peran sebagai teknisi dan fasilitator komunikasi. Sebagai teknisi komunikasi, humas berperan sebagai pembuat dan pelaksana kegiatan *media relations*, di mana humas tidak ditempatkan sebagai sumber informasi dalam kegiatan *media relations* tersebut. Sedangkan sebagai fasilitator, humas berperan sebagai penghubung wartawan dengan narasumber yang lebih menguasai isu-isu yang ditanyakan oleh wartawan. Dari kedua peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa humas bukan merupakan corong utama bagi wartawan untuk mendapatkan informasi di lingkungan DPRD Prov. Riau. Dalam hal ini, humas belum mampu menjalankan tugas sebagai perwakilan DPRD Prov. Riau, terutama sebagai sumber informasi utama bagi wartawan di lingkungan DPRD Prov. Riau.

Media relations dilakukan oleh Humas DPRD Prov. Riau dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk acara (event) dan tulisan. Untuk kegiatan dalam bentuk acara (event), Humas rutin mengadakan konferensi pers, *presstour*, media visit, *interview* dan *meeting with editor*. Selain itu, Humas rutin kegiatan kebersamaan minimal satu tahun sekali bersama seluruh anggota forum WPR untuk membangun hubungan interpersonal dengan pihak wartawan. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi Humas terhadap wartawan, setiap akhir tahun Humas juga memberikan penghargaan kepada wartawan yang aktif meliput di DPRD Prov. Riau.

Sedangkan untuk kegiatan dalam bentuk tulisan, Humas DPRD Provinsi Riau rutin melaksanakan *Press Release*, *Placing Opinion Pieces in*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

the Local Newspaper, Public Service Announcement (Pemberitahuan Layanan Publik).

Dalam pelaksanaan *media relations* di DPRD Prov. Riau, humas membuka akses seluas-luasnya bagi wartawan untuk bertemu langsung dengan narasumber. Dalam hal ini, wartawan tidak perlu melalui humas terlebih dahulu jika ingin menemui narasumber. Di satu sisi, keterbukaan akses informasi tersebut menjadi nilai tambah bagi Humas DPRD Prov. Riau sebab hal tersebut dapat menghapus stigma negatif mengenai instansi yang sebelumnya dikenal sangat birokratif. Namun disisi lain, wartawan justru menganggap hal tersebut sebagai bentuk ketidaksiapan humas dalam melayani kebutuhan wartawan akan informasi dan menganggap humas tidak menguasai isu-isu seputar DPRD Prov. Riau. Pada akhirnya, humas hanya ditempatkan sebagai sumber informasi seputar agenda kegiatan saja.

B. Saran

Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan dapat menjadi penambah referensi dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan pelaksanaan Humas DPRD Prov. Riau. Besarnya lingkup kerja DPRD Prov. Riau memang mempersulit pejabat dan staf Humas dalam memahami dan menyediakan seluruh informasi dan isu yang dibutuhkan oleh wartawan, oleh karena itu perlu adanya pembagian tugas yang jelas antar setiap staf humas agar semua informasi yang dibutuhkan wartawan dapat di-cover oleh Humas. Dengan demikian, humas dapat mengambil posisi tidak hanya sebagai fasilitator, melainkan juga sebagai sumber informasi.

Menurut hemat peneliti, pelaksanaan *media relations* humas DPRD Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik namun tidak dipungkiri masih banyak terdapat kekurangan dalam konsep kegiatan dan pelaksanaan.

Adanya keterbukaan akses dalam sebuah lembaga pemerintah memang merupakan hal yang baik, namun hal ini tidak serta-merta berarti

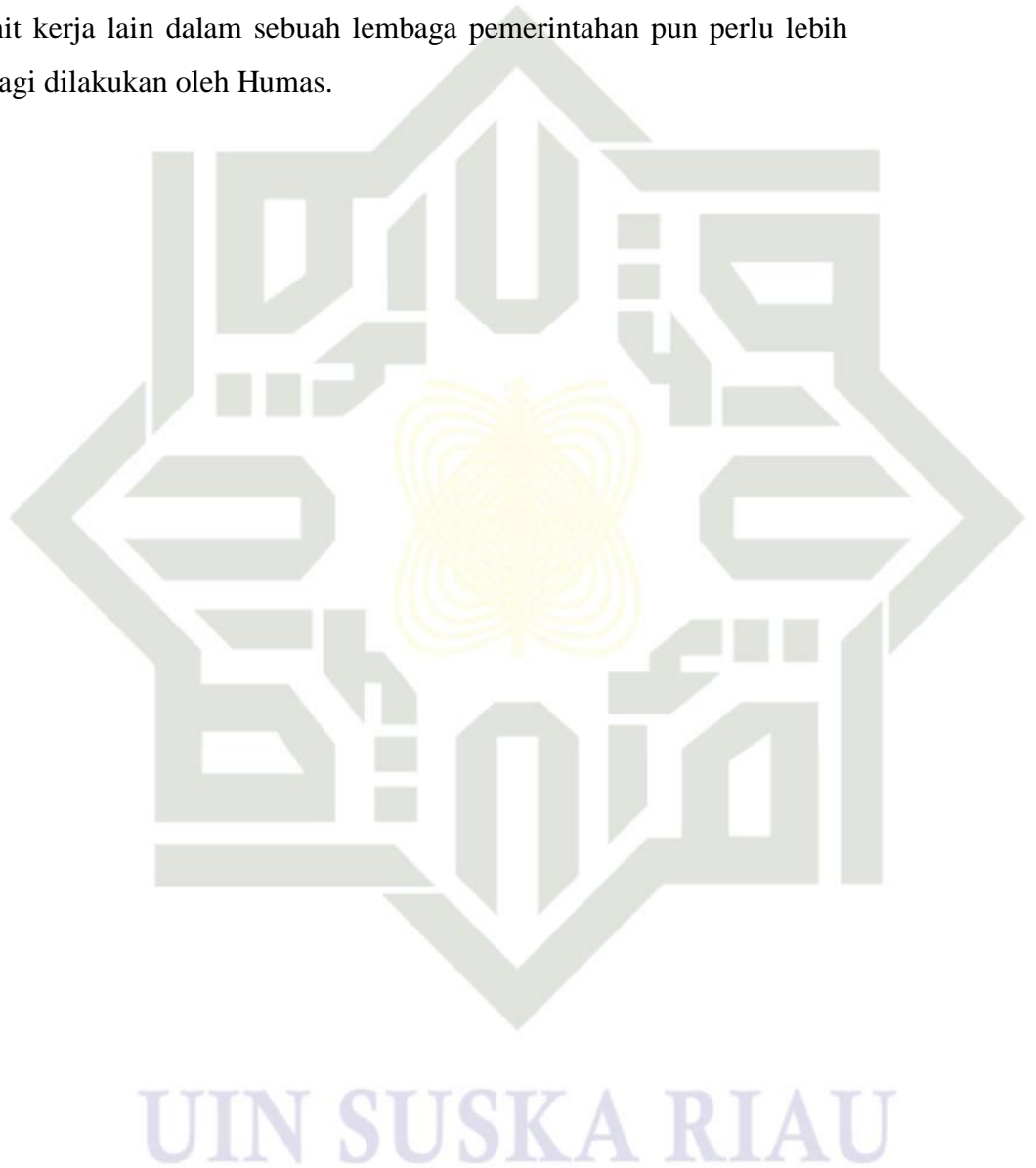
Humas DPRD Prov. Riau, dalam hal ini humas tidak boleh lepas tangan terhadap informasi yang keluar-masuk di lingkungan lembaga pemerintah tersebut. Humas perlu tetap mengawal setiap informasi yang keluar dari unit kerja lain agar informasi yang diterima masyarakat tidak menjadi simpang siur, melainkan tetap sejalan satu sama lain. Untuk itu, koordinasi dengan setiap unit kerja lain dalam sebuah lembaga pemerintahan pun perlu lebih intensif lagi dilakukan oleh Humas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Linggar. *“Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia,* (Jakarta:Bumi Aksara,2000), hal 2.

Arikunto Suharsimi, 2016, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Askara.

Bungin B, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kendana Pemuda Media Group.

Cutlip, *Effective Public Relations Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan dengan Sukses*,(Jakarta: PT. INDEKS Kelompok GRAMEDIA,2005), hal 4.

Diah Wardani, 2008, *Media relations Sarana Membangun Reputasi Organisasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lexy J. Moleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Lexy J. Moelong, 2004, *Prosedur Penelitian*, Bandung: PT. Rineka Cipta.

Morissan, *Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional*(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 8.

PJoko Subagyo, 1996, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ransil, Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*.

Reni Darmastuti, *Media Relations Konsep. Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta:ANDI Yogyakarta,2012), hal 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rivers Wiliam L, 2006, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Pustaka Karya.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Humas dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal1-2.

-----*Manajemen Humas dan Media Komunikasi*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hal 167

Sandra Oliver, *Strategi Public Relations*, (London, Erlangga,2007), hal 2.

Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto. *Dasar-dasar Public Relations*,(Bandung:Rosdakarya, 2010), hal 91.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, 2001, Yogyakarta: UII Press.

Wardhani, Diah. *Media relations : Sarana Membangun Reputasi Organisasi*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, cetakan pertama).

Internet

Admin. (1999). *Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. 15 November 2011.

http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_No_40_Tahun_1999_Tentang_Pers.pdf.

Bakohumas. (2007). *Kode Etik Humas Pemerintah*. 15 November 2011.
http://bakohumas.kominfo.go.id/files/pdf/Kode_Etik_Kehumasan.pdf.

Asiansi Jurnalis Indonesia. (2008). *Kode Etik Jurnalistik*. 15



November 2011.
[http://www.ajiindonesia.org/index.php?option=com_content
 &view=article&id=67&Itemid=155](http://www.ajiindonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=155).

Admin. (2011, Maret 21). *Bersahabat Dengan Media*. 15 Oktober 2011.
http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=34.

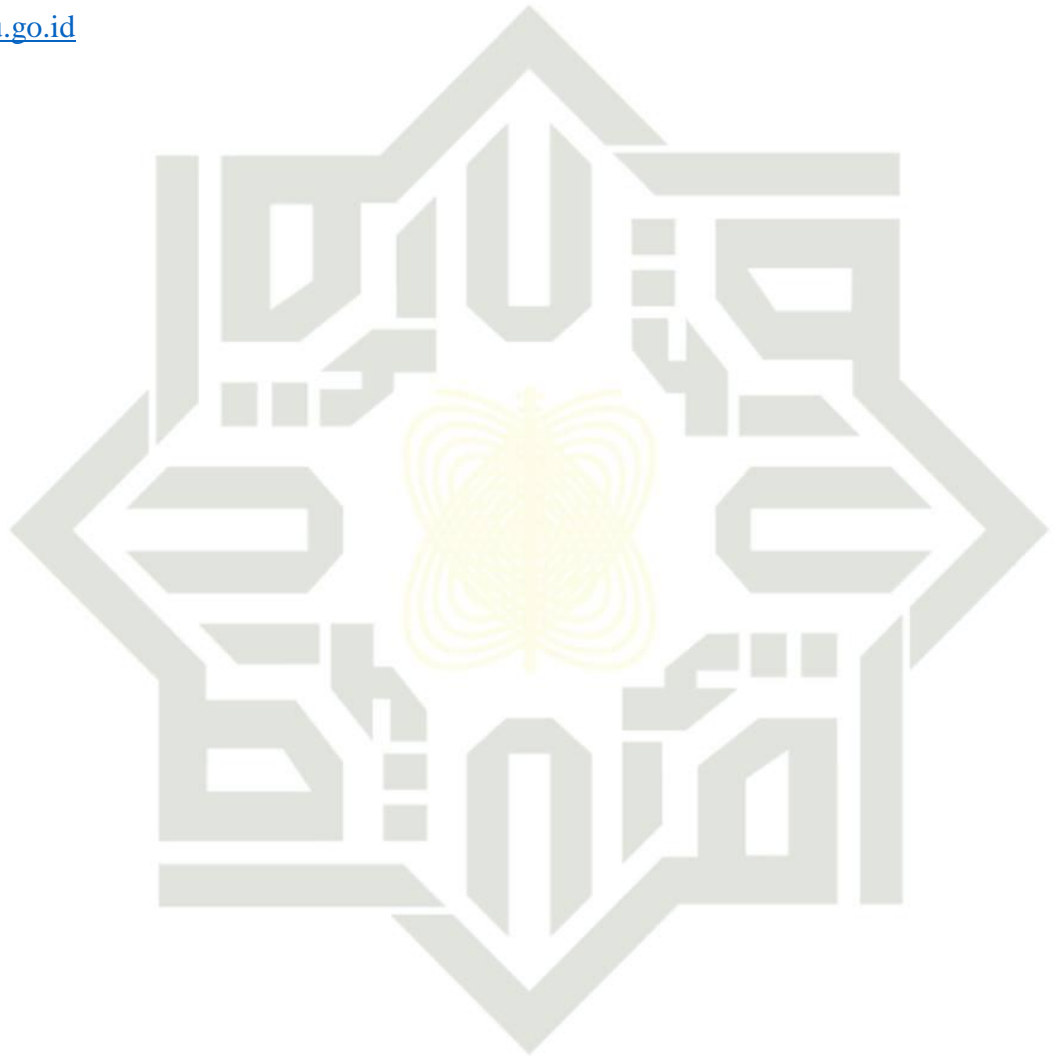
www.dprd.riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1 Panduan Wawancara Humas

Bagaimana pandangan Anda mengenai pentingnya *media relations* di lembaga pemerintah, khususnya di DPRD Prov. Riau?

Bagaimana peran Humas dalam pelaksanaan *media relations* tersebut?

Apa saja kegiatan *media relations* yang telah dilakukan oleh Humas DPRD Prov. Riau ?

Informasi seperti apa yang biasanya banyak diminta atau menarik minat para wartawan?

Jika ada informasi yang dibutuhkan oleh wartawan, siapa pihak dalam DPRD Prov. Riau yang biasanya dihubungi pertamakali?

Adakah fasilitas-fasilitas khusus yang disediakan untuk mendukung peliputan yang dilakukan oleh wartawan?

7. Media apa saja yang kooperatif dalam pelaksanaan *media relations* di DPRD Prov. Riau?

8. Media apa saja yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan *media relations* di DPRD Prov. Riau?

9. Bagaimana pendapat Anda terhadap pemberitaan yang beredar di media massa?

10. Apakah pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan harapan DPRD Prov. Riau?

11. Bagaimana pendapat Anda seputar pemberitaan negatif tentang DPRD Prov. Riau di media massa?

12. Tindakan apa yang dilakukan untuk menanggapi pemberitaan seperti itu?

13. Apakah Humas pernah tersangkut masalah dengan wartawan selama pelaksanaan *media relations*?

14. Apa saja hambatan yang ditemui dalam melaksanakan *media relations* di lingkungan DPRD Prov. Riau ini?

15. Hal-hal apa saja yang mendukung pelaksanaan *media relations* di DPRD Prov. Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Panduan Wawancara Wartawan

Apakah *media relations* penting bagi keberlangsungan tugas jurnalistik wartawan, khususnya di DPRD Prov. Riau?

Bagaimana hubungan media (*media relations*) yang ideal menurut Anda?

Bagaimana pendapat Anda mengenai kegiatan-kegiatan tersebut?

Bagaimana akses informasi yang disediakan DPRD Prov. Riau?

Siapa pihak yang dicari jika membutuhkan informasi atau data untuk pembuatan berita?

Informasi seperti apa yang biasanya diminati oleh wartawan?

Apakah informasi yang diinginkan itu selalu dapat dipenuhi oleh Humas?

Informasi seperti apa yang biasanya diberikan oleh Humas DPRD Prov. Riau?

Adakah fasilitas-fasilitas khusus yang disediakan untuk mendukung peliputan yang dilakukan oleh wartawan?

Jika Humas DPRD Prov. Riau mengundang Anda untuk ikut dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh Humas DPRD Prov. Riau, tentu mereka berharap agar ada publikasi. Bagaimana tanggapan Humas jika ternyata berita tersebut tidak Anda publikasikan?

Jika ada pemberitaan negatif, apa ada tindakan khusus yang dilakukan oleh Humas terhadap media massa/wartawan yang mempublikasikan berita tersebut?

Pernahkan Humas DPRD Prov. Riau meminta Anda untuk tidak mempublikasikan berita-berita tertentu?

Apakah Anda pernah tersangkut masalah dengan Humas DPRD Prov. Riau?

Hal-hal apa saja yang mempermudah/menjadi pendukung dalam hubungan Anda dengan Humas DPRD Prov. Riau?

Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan *media relations* di DPRD Prov. Riau?

Apa saja hal-hal yang mendukung pelaksanaan *media relations* di DPRD Prov. Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Bagaimana pandangan Anda terhadap *media relations* yang telah dijalankan oleh DPRD Prov. Riau?

19. Apakah Humas DPRD Prov. Riau sering mengadakan kegiatan informal untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pihak media massa/wartawan?

20. Adakah saran atau masukan guna peningkatan pelaksanaan *media relations* di DPRD Prov. Riau?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 Dokumentasi



Wawancara bersama Kepala Bagian Umum DPRD Prov.Riau



Wawancara bersama Kasubag Humas dan Perpustakaan DPRD Prov. Riau

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Nurlisa Alfiunita, lahir di Tembilahan, 17 Mei 1995 yang merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Bapak Samsuni dan Ibu Rosmawati dan mempunyai saudara laki-laki yang bernama Tommy Saputra, Robby Septiawan, Randi Gustiawan, Mustafid Ridho, M. Dheka Syahbani dan saudara perempuan bernama Erviyanti.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dari SD Negeri 3 Tembilahan (2000 – 2006), SMP Negeri 1 Tembilahan (2006 – 2009), SMK Negeri 1 Tembilahan (2009 – 2012). Selanjutnya meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengambil Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di salah satu BUMD tepatnya di PT. Bumi Siak Pusako Selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juni Sampai Dengan Bulan Agustus 2017. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul: **“Pelaksanaan Media Relations Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.